

## **GAM DAN ISU PELANGGARAN HAM DI ACEH: STUDI KASUS KONFLIK 1975-2005**

**Nursaleha<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Sejarah, Jabal Ghafur, Sigli

\*Corresponding author: [Shaleha188@gmail.com](mailto:Shaleha188@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the vertical conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian central government in the period 1975-2005, covering the New Order era to the Reformation era. Using a qualitative approach and descriptive methods through observation techniques and library research, this study aims to examine the history of the formation of GAM, the dynamics of the vertical conflict in Aceh, the factors that drove the Acehnese people's desire to break away from Indonesia, and efforts to resolve the conflict to reach a peace agreement. The results of the study indicate that GAM was formed in response to the central government's centralistic policies, exploitation of natural resources, and marginalization of local political and cultural issues, with the conflict going through various phases of escalation until its peak in the Military Operations Area (DOM) period, which was then successfully resolved through international negotiation and mediation by signing the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) in 2005 as a peaceful solution that provides special autonomy for Aceh.*

**Keywords:** Conflict, GAM, New Orde

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat Indonesia pada periode 1975-2005, yang mencakup masa Orde Baru hingga era Reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif melalui teknik observasi serta penelitian kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah terbentuknya GAM, dinamika perjalanan konflik vertikal di Aceh, faktor-faktor yang mendorong keinginan rakyat Aceh untuk melepaskan diri dari Indonesia, serta upaya-upaya penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GAM terbentuk sebagai respons terhadap kebijakan sentralistik pemerintah pusat, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi politik-budaya lokal, dengan konflik melalui berbagai fase eskalasi hingga puncaknya pada periode Daerah Operasi Militer (DOM), yang kemudian berhasil diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi internasional dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 sebagai solusi damai yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh.

**Kata kunci:** Konflik, GAM, Orde Baru

## 1. Pendahuluan

Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan: tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. (Kurnia Jayanti, 2013).

Lagi-lagi, ketidakpuasan atas kebijakan yang dipilih oleh pemerintah pusat, menjadi pemicu lahirnya kembali perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah republik. Empat belas tahun setelah perdamaian, Aceh kembali meletup konflik. Bertempat di Tiro, Pidie, tempat lahir para leluhurnya, Hasan Tiro memproklamirkan berdirinya Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), atau dikenal Gerakan Aceh Merdeka, pada 4 Desember 1976, yang menandai dimulainya perlawanan terhadap republik. Deklarasi perlawanan yang dipimpin Hasan Tiro ini segera direspon oleh Jakarta, dengan serangkaian operasi militer. Para pimpinan GAM diburu hingga ke hutan-hutan, ribuan masyarakat sipil menjadi korban, akibat operasi perburuan terhadap anggota-anggota GAM yang dilakukan oleh tentara. Akibat operasi yang terusmenerus yang dilakukan oleh TNI untuk menebas pimpinan-pimpinan GAM dan melumpuhkan para anggota GAM, pada akhirnya Hasan Tiro sampai harus melarikan diri ke Swedia, dan memimpin perlawanan dari sana. (Wahyudi Djafar, 2011).

GAM yang di pimpin Hasan Tiro di kenal oleh rakyat Aceh Sebagai Wali Negara Aceh Merdeka menyatakan, bahwa ideologi yang di pilihnya bukan Islam serta orientasi politiknya bukan pendirian negara Islam sebagaimana pendahulunya lakukan. GAM adalah simbolisasi dan institusionalisasi dari identitas politik ini. Akibatnya, Aceh yang tadinya hanya sekedar etnis dan kartografis telah bertansformasi menjadi identitas politik. Gerakan Aceh Merdeka didukung oleh tiga kelompok masyarakat Aceh, yaitu golongan intelektual dan golongan profesional, golongan ulama serta golongan rakyat biasa. (Kurnia Jayanti, 2013).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas konflik vertikal yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan pusat-daerah dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui analisis mendalam terhadap kasus konflik GAM-pemerintah pusat Indonesia periode 1975-2005, penelitian ini berusaha mengungkap dinamika politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang melatarbelakangi konflik berkepanjangan tersebut, serta mengkaji efektivitas berbagai pendekatan penyelesaian konflik hingga tercapainya kesepakatan damai melalui MoU Helsinki 2005. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berguna bagi pengembangan studi konflik dan resolusi konflik di Indonesia, sekaligus memberikan pembelajaran berharga dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik serupa di masa mendatang.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat Indonesia periode 1976-2005. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kronologi dan dinamika konflik secara sistematis, sedangkan aspek analitis diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, perkembangan, dan penerapan strategi perlawanan GAM terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemilihan metode ini didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber tertulis yang memadai untuk mendukung analisis mendalam terhadap fenomena konflik yang kompleks dan multidimensi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library Research) dan observasi. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku-buku akademik tentang sejarah Aceh dan konflik GAM, jurnal ilmiah dan artikel penelitian terkait. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan melalui observasi terhadap kondisi sosial-politik terkini di Aceh yang masih mencerminkan dampak konflik historis tersebut. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan sejarah sosial (social history), yaitu pendekatan yang mengkaji gejala sejarah dengan memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap struktur sosial masyarakat Aceh dan perubahan yang terjadi akibat konflik, aspek profesional dan institusional yang terlibat dalam konflik, serta interaksi antara faktor lokal dan nasional dalam dinamika konflik. Dengan demikian, pendekatan sejarah sosial menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai konflik vertikal GAM-pemerintah pusat dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sejarah Terbentuknya GAM**

Pada tahun 1953-1962 terjadi pemberontakan yang pertama di Aceh yakni pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beure'uh. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat Islam seperti yang telah dijanjikan Presiden Soekarno, tetapi justru kemudian dimasukkan ke dalam provinsi Sumatra Utara. Selain itu kekecewaan rakyat Aceh semakin diperburuk dengan disingkirkannya Teungku Daud Beure'uh oleh pemerintah pusat. Setelah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat kembali terefleksikan dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro (Rezha Latifatul Khafi, 2021).

Sekitar tahun 1974-1975, Hasan Tiro berada di Pidie untuk mulai mensosialisasikan idenya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk berdirinya Gerakan Aceh Merdeka dan pada tahun 1976 Hasan Tiro semakin memantapkan rencananya untuk membuat gerakan bagi kemerdekaan Aceh namun Hasan Tiro tidak lagi menempatkan ideologi Islam sebagai misi utama, akan tetapi beliau mengusung tema nasionalisme dan patriotisme Aceh. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya,

Hasan Tiro segera menghubungi para ulama dan intelektual lainnya untuk mendukung rencananya. Karena keterbatasan beliau mensosialisasikan rencananya terhadap para ulama dan intelektual Aceh lainnya, menyebabkan hanya sedikit para ulama dan intelektual Aceh yang dapat di tarik untuk bergabung dengan GAM.

Pada tanggal 4 Desember 1976 tepatnya di bukit Chokan, pedalaman kecamatan Tiro, kabupaten Pidie, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM. Munculnya GAM adalah akibat kebijakan pemerintah pusat dengan ABRI/TNI sebagai penopang utama yang di anggap tidak adil terhadap rakyat Aceh dan gerakan ini dapat di pandang sebagai representasi kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh terhadap Indonesia pada masa Orde Baru. Dalam doktrin pendirian GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu: bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintahan Indonesia. GAM merupakan pemberontakan orang Aceh jilid ke-dua yang memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam NKRI merupakan tindakan ilegal<sup>23</sup>. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan yang sentralistik pemerintah Republik Indonesia. Faktor pemicu utama adalah kelahiran birokrat dari Jawa yang menyingkirkan elit Aceh (Kurnia Jayanti, 2013).

## **2. Perjalanan konflik Vertikal di Aceh yang dilalui GAM**

Dalam perkembangannya GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kaum terpelajar, operasi yang dilakukan untuk melawan GAM adalah didominasi oleh TNI-AD di bawah Kodam I/Bukit Barisan. Mereka yang di jadikan sebagai objek kejahatan kemanusiaan oleh negara, yakni mereka yang menyatakan dirinya sebagai pendukung GAM, dan pada akhir tahun 1979 pemerintah Indonesia berhasil menumpas gerakan ini. Sehingga, GAM menjadi gerakan bawah tanah. Pada fase ini, operasi militer masih belum mendekonstruksi kesadaran berbangsa orang Aceh, namun mulai menciptakan embrio gerakan yang lebih radikal dan matang. Sehingga Pada kurun waktu 1976 sampai dengan 1989 untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, tentara Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (sweeping) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka, di daerah yang diduga sebagai basis GAM (Kurnia Jayanti, 2013).

Fase Kedua, 1989-1998. Fase yang lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM), dimulai ketika pada tahun 1989 kaum gerilyawan GAM yang telah melalui pendidikan militer di Libya sejak tahun 1986 kemudian muncul kembali di Aceh dan di susul pula oleh konsolidasi struktur komando GAM di Aceh. Pemerintah Indonesia pada tahun

1990-an kemudian juga mengambil kebijakan yang sangat militeristik dengan menggelar operasi Jaring Merah dan memberikan status Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa DOM, pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organik sebanyak 12 kompi dari pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh satgas Inteligen (Kopassus). Pasukan yang di kirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut, dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan dan pemberlakuan Daerah Operasi Militer untuk mengatasi GAM yang telah menelan banyak korban dan di warnai dengan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh karena dalam menjalankan operasinya di Aceh. ternyata pasukan TNI bukan berusaha mencari simpati hati rakyat Aceh, sebaliknya mereka mempertontonkan berbagai arogansinya yang sangat menyakiti hati rakyat Aceh, seperti pengusiran penduduk dari desanya, pemukulan, pembunuhan hingga pemerkosaan. Akibat DOM tersebut, ribuan anak menjadi yatim piatu, banyak rumah rusak atau dibakar, banyak istri yang menjadi janda, banyak orang cacat karena penganiayaan, dan korban jiwa pun sulit untuk di perkirakan jumlahnya pastinya. Di perkirakan jumlahnya mencapai 3800 sampai 35.000 jiwa. DOM juga menyebabkan pula perekonomian Aceh mengalami stagnasi, sehingga kondisi kehidupan rakyat Aceh sangat memprihatinkan. Dalam perkembangannya, para korban baik laki-laki maupun perempuan, mereka generasi yang sudah tidak mempunyai harapan besar terhadap NKRI akibat tindak kekerasan, kemudian mereka bergabung dengan GAM. Hal ini terlihat dari adanya pasukan Srikandi yang merupakan pasukan perempuan GAM korban-korban DOM baik korban perkosaan maupun janda (Kurnia Jayanti, 2013).

### **3. Dampak Konflik GAM Terhadap Masyarakat Aceh**

Dampak dari konflik bersenjata antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang sangat dirugikan adalah Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil ini yang tidak tahu menau akan konflik yang terjadi ini malah menjadi korban dari keganasan konflik tersebut. Berdasarkan laporan Amnesty International dalam jurnalnya : Shock Therapy Restoring order in Aceh 1989-1993 (1993) menyebutkan bahwa jumlah korban pasca konflik ini berjumlah sekitar 2.000 masyarakat sipil. Dimana kebanyakan korban tersebut dari kalangan anak-anak, dan orang tua.(Amnesty International, 1998) Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat sipil juga merambah ke sektor ekonomi dimana mereka yang tadinya harus berdagang, berkerjka namun terhalang oleh konflik bersenjata ini. Tak hanya merambah ke segi sektor ekonomi dampak dari konflik ini juga merambah ke segi politik dan sosial. Selain banyaknya korban dari konflik tersebut banyak juga dampak-dampak yang di rasakan masyarakat sipil yang disebabkan oleh konflik bersenjata GAM dengan Pemerintah Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a) Dampak dari segi Ekonomi Pada saat itu pihak Gam Aceh menerapkan strategi Pajak Nanggroe dimana Masyarakat sipil terutama para pengusaha atau Perusahaan yang berada di

wilayah Aceh ini membebaskan pajaknya untuk dibayarkan ke pihak GAM Aceh. Dengan menerapkan strategi ini pihak GAM bisa menstabilkan ekonomi mereka walaupun mereka sedang berperang dengan pemerintah Indonesia secara begerilya. Dana yang didapatkan dari pajak tersebut selain digunakan untuk operasional GAM juga digunakan untuk Masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik ini. Namun setelah perjanjian Helsinki, kondisi pada masa lalu dimana konflik yang berkepanjangan ditambah dengan gempa bumi dan gelombang tsunami membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran hampir di semua bidang, pada masa konflik aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan lancar, sektor produksi dan pelayanan jasa terganggu akibat ketidakpastian kondisi keamanan (Ridhwan, M, 2015)

b) Dampak dari segi Politik setelah perjanjian MoU, AMM (Aceh Monitoring Mission) memintah pihak GAM untuk membubarkan struktur organisasinya untuk menghilangkan unsur separatisme, dan mengubahnya menjadi komite. Namun yang terjadi organisasi ini menjadi organisasi yang tertutup bagi pihak atau kelompok luar yang bukan simpatisan GAM. Hingga mengakibatkan dalam proses rekonsiliasi KPA (Komite Peralihan Aceh) tidak hanya mengalihkan GAM dari Gerakan Masyarakat sipil bersenjata, tetapi menjadi gerakan politik. Setelah proses rekonsiliasi ini berjalan dengan lancar maka langkah selanjutnya dengan Pemilihan umum dimana pada tahun 2004 merupakan tahun politik dan demokrasi di Indonesia. Pemilihan yang bukan hanya untuk memilih anggota DPR namun juga untuk memilih Presiden. Setelah pemilu 2004, Aceh juga melaksanakan pemilihan langsung dimana pemilu ini untuk memilih kepala daerah. Setelah masa konflik yang sangat Panjang akhirnya Aceh dapat melangsungkan pemilihan umum secara langsung, disamping adanya ketidakstabilan dari sosial-politik dan ekonomi Aceh. Dalam pemilu di Aceh ini KPA yang merupakan wadah integrasi politik bagi para mantan anggota GAM menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Dimana pada pemilu ini banyak dimenangkan oleh pasangan yang dulunya berasal dari simpatisan GAM. Bisa digaris bawahi bahwa masyarakat Aceh masih percaya dengan kepemimpinan bekas simpatisan GAM (Moh. Ikhlasul Adha, 2023).

c) Dampak dari segi Sosial Dalam konflik ini Masyarakat sipil juga mengalami masa-masa yang sulit, dimana mereka harus merelakan kehidupan bersosial mereka dan memilih untuk berlindung diri kepada salah satu pihak agar tidak menjadi korban dari kedua belah pihak. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dimana kebanyakan korbannya merupakan Masyarakat sipil. Hak Asasi Manusia yang seharusnya bisa didapatkan oleh Masyarakat Aceh namun harus terabaikan bahkan terdiskriminasi oleh beberapa oknum yang terlibat dalam konflik bersenjata ini (Moh. Ikhlasul Adha, 2023).

#### **4. Simpulan dan Saran**

Konflik yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah RI sudah berlangsung sejak 1976-2005. Konflik yang terjadi terbagi kepada 3 generasi yaitu generasi pertama yang terjadi pada tahun 1976-2005. Generasi kedua terjadi pada tahun 2005 dimana terdapat upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah RI dan GAM sehingga lahirlah perjanjian MoU Helsinki. Sedangkan generasi ketiga terjadi pasca perjanjian MoU Helsinki dimana konflik terus terjadi yang disebabkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan GAM. Perjanjian MoU Helsinki dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: kedudukan MoU Helsinki sebagai bentuk Perdamaian dan penerapan MoU Helsinki terhadap kesejahteraan masyarakat. MoU Helsinki merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Pemerintah RI dengan GAM yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak tahun 1976 yang di pimpin oleh Hasan di Tiro.

Saran yang dapat diberikan terkait konflik antara GAM dan isu pelanggaran HAM di Aceh adalah perlunya komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama periode konflik 1975–2005. Pemerintah perlu memperkuat lembaga seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh agar memiliki kewenangan yang lebih jelas dan efektif dalam menindaklanjuti laporan serta memberikan keadilan bagi para korban. Selain itu, upaya pemulihan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, harus difokuskan pada para korban dan keluarganya, khususnya perempuan dan anak yang mengalami dampak paling besar dari kekerasan. Program reparasi, bantuan sosial, serta dukungan hukum juga penting untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Di sisi lain, pendidikan tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai perdamaian perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun kegiatan masyarakat, agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Dokumentasi sejarah konflik serta pengalaman korban juga perlu dijaga dan disebarluaskan sebagai bagian dari memori kolektif dan pembelajaran bangsa.

### Daftar Pustaka

- Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas* , 19 (1), 49-70.
- Khafi, R. L. (2021). Persepsi Pemuda Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus: Mahasiswa UIN Ar-Raniry) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY)
- Djafar, W. (2011). Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya. Juris: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum UI.
- Wahyudi, R. (2021). KEBEBASAN PERS PERSPEKTIF MARXIST THEORY: STUDI TERHADAP KONSTRUKSI BERITA KONFLIK ACEH. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, 11(2), 121-136.
- Fahriawan, M. W. F. (2023). *Penyelesaian konflik antara gam dengan ri di aceh tahun 1998 2005/Muhamad Wafi Fahriawan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Hertiana, E., & Amboro, K. (2017). Pengaruh Konflik Gam-Ri di Bidang Politik dan Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat Aceh Tahun 1976-2012. *SwarnaDwipa*, 1(1).
- Muslim, S. N. (2022). *PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: AKHIR KONFLIK GAM DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (1976-2005)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Pangestu, MVP GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM).
- Adha, M. I. (2023). Analisis Dampak Konflik Bersenjata GAM Dengan Pemerintah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 17-21.
- Mastuti, S. (2001). Konflik vertikal di Aceh: studi kasus Gerakan Aceh Merdeka (1976-1982). *Universitas Indonesia Library*.